



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 257 A /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 1B/KEP/HK/2023 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 dan Perubahannya telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa masih terdapat usulan rancangan peraturan gubernur dari perangkat daerah yang belum terakomodir dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 4. Keputusan Gubernur ...

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Daftar Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juli

2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 257A /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 21 Juli 2023**TENTANG DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	ASAL PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Perubahan Atas Lampiran V Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah	
3.	Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
4.	Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
5.	Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
6.	Pembayaran Insentif Dokter Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
7.	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
8.	Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
9.	Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	

10.	Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
11.	Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12.	Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
14.	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Nusa Tenggara Timur	
16.	Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
18.	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	
19.	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	
20.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
21.	Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

22.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
23.	Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024	
24.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
25.	Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024	
26.	Inovasi Daerah	
27.	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
28.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026	
29.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	
30.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	
31.	Penanggulangan AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	
32.	Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
33.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
34.	Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
35.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
36.	Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah.	

37.	Penyelenggaraan Penanganan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
38.	Pembangunan Arboretum di Provinsi Nusa Tenggara Timur	
39.	Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
40.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
41.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur	
42.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
43.	Tata Naskah Dinas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	
44.	Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
45.	Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan	
46.	Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya	
47.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2027	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
48.	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Tahun 2023	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
49.	Kajian Resiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
50.	Pengurangan Resiko Bencana	
51.	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
52.	Pedoman Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial	
53.	Wajib Gladi Simulasi Untuk Kantor-Kantor Publik	
54.	Layak Aman Bencana	
55.	Cluster Dalam Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana (RPKB)	
56.	Tata Cara Pengajuan Proposal Sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
57.	Penyelenggaraan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana	

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	ASAL PERANGKAT DAERAH
1	2	3
58.	Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
59.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Timor	Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur
60.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Flores	
61.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Sumba	
62.	Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur
63.	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Naimata	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur
64.	Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	
65.	Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
66.	Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
67.	Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
68.	Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
69.	Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
70.	Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	

71.	Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur
72.	Pedoman Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
73.	Renstra Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
74.	Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata	
75.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Persandian	Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

